

**NASIONALISASI DAN DINAMIKA BANK TABUNGAN NEGARA
TAHUN 1950-1968**

JURNAL

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra**



Oleh:

SITI NURHAYATI

12407144019

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

Nasionalisasi dan Dinamika Bank Tabungan Negara Tahun 1950-1968

Oleh
Siti Nurhayati
12407144019

ABSTRAK

Bank Tabungan Negara pertama kali didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1898 dengan nama *Postspaarbank*. Tujuan awal didirikannya adalah untuk mengajak masyarakat Indonesia agar terbiasa menabung, selain itu *Postspaarbank* juga memfokuskan usahanya pada pengumpulan dana dalam bentuk tabungan. Pada masa pemerintahan Jepang, *Postspaarbank* diubah namanya menjadi *Tyokin Kyoku* namun bank ini kemudian mengalami kemunduran. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UUDr tahun 1950 yang menyatakan bahwa *Postspaarbank* diambil alih kekuasaannya sebagai bank milik pemerintah dengan nama Bank Tabungan Pos. Selama tahun 1950-1968 Bank Tabungan Negara mengalami dinamika dalam perkembangannya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui awal mula munculnya Bank Tabungan Negara, proses nasionalisasi dan dinamika Bank Tabungan Negara tahun 1950-1968, serta reorganisasi yang terjadi pada Bank Tabungan Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara selama tahun 1950-1968 beberapa kali berganti nama dan berubah fungsi. Pada tahun 1950, *Postspaarbank* resmi dinasionalisasi dengan nama Bank Tabungan Pos di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 1964, pemerintah mengganti nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara dan menempatkan BTN dibawah pengawasan Menteri Urusan Bank Sentral. Pada tahun 1965, BTN diintegrasikan ke dalam Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia Unit V, hal ini dilakukan sehubungan dengan usulan pendirian Bank Tunggal. Pada tahun 1968, sistem Bank Tunggal dihapuskan dan BTN kembali menjadi bank tabungan yang bersifat mandiri. Selama tahun 1950-1968 Bank Tabungan Negara mengalami peningkatan saldo dan juga nasabah. BTN juga banyak memberi pinjaman pada daerah-daerah otonom untuk pembangunan sarana penunjang kegiatan perekonomian.

Kata Kunci: Bank Tabungan Negara, Nasionalisasi, Bank Tabungan Pos.

The Nationalization and Dynamics of *Bank Tabungan Negara* in 1950-1968

ABSTRACT

By
Siti Nurhayati
12407144019

Bank Tabungan Negara (State Savings Bank) was established for the first time by the government of Hindia Belanda (Dutch East Indies) in 1898 with its initial name *Postspaarbank*. The original purposes of this bank establishment were to persuade Indonesian people to make saving money their habit. Besides, the bank also focused its effort on the fund-raising in the form of savings. In the period of Japanese occupation, the name of the bank was changed into *Tyokin Kyoku*, but then it suffered a setback. The Indonesian government issued the 1950 UUDr stating that the government took over its authority and made it a government-owned bank under the name of Bank Tabungan Pos (Postal Savings Bank). During 1950-1968, the bank experienced some dynamics in its development. This research is aimed to reveal the establishment of Bank Tabungan Negara for the first time, its nationalization process and dynamics in 1950-1968, and the reorganization experienced by the bank. The results of the research show that *Bank Tabungan Negara* in 1950-1968 changed its name and function for several times. In 1950, *Postspaarbank* was officially nationalized under the name of Bank Tabungan Pos under the supervision of the Ministry of Transportation. In 1964, the government changed its name from Bank Tabungan Pos into Bank Tabungan Negara and put it under the supervision of the Minister for the Central Bank. In 1965, in connection with the establishment of a single bank proposal it was integrated into the Central Bank under the name of Bank Negara Indonesia (Indonesian State Bank) unit V. In 1968, the single bank system was abolished, and BTN was back being an independent savings bank. In 1950-1968, the bank experienced an increase in balance and in customers. It also provided loans for autonomous regions for the development of supporting facilities of economic activities.

Keywords: Bank Tabungan Negara, Nationalization, Bank Tabungan Pos.

A. PENDAHULUAN

Bank pertama kali diperkenalkan di Indonesia secara resmi pada permulaan abad ke-19.¹ Terdapat tiga bank utama milik pemerintah yang masing-masing

¹ Pada saat itu Indonesia masih bernama *Nederlandsch Indie*, terdapat juga beberapa lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk pribumi. Diantaranya: Lumbung Desa, Bank Kredit Rakyat, Bank Desa dan Bank Pasar.

mempunyai tugas berbeda. Ketiga bank tersebut adalah *De Javasche Bank* yang didirikan tanggal 10 Oktober 1827, *De Postspaarbank* didirikan tahun 1898, dan *De Algemene Volkscredietbank* didirikan tahun 1934. *De Javasche Bank* bertugas sebagai bank sirkulasi, *De Algemene Volkscredietbank* bertugas sebagai bank kredit, dan yang terakhir adalah *De Postspaarbank* yang bertugas sebagai bank tabungan. Selain ketiga bank tersebut, terdapat pula bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan dari pemerintah seperti bank milik orang-orang Belanda, Inggris, Cina, Jepang dan pribumi. Bank milik orang-orang Belanda diantaranya adalah *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM), *De Escomptobank N.V.* dan *Nationale Handelsbank* (NHB). Bank milik orang-orang Jepang antara lain, *The Bank of Taiwan*, *The Yokohama Species Bank* dan *The Mistui Bank*. Milik orang-orang Cina dan Inggris diantaranya, *N.V. Batavia Bank*, *N.V. Bankvereniging Oei Tiong Ham* dan *The Chartered Bank of India*. Bank milik orang-orang pribumi adalah Bank Nasional “Abuan Saudagar” yang terdapat di Bukittinggi dan Bank Boemi di Jakarta.²

Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, kegiatan perbankan di Indonesia sebagian besar dijalankan oleh bank swasta milik kolonial seperti NHM dan NHB. Akan tetapi, bank milik pemerintah juga memegang peranan yang cukup penting. Mengenai urusan masyarakat kalangan menengah ke bawah, pemerintah memberikan tugas kepada *De Postspaarbank* dan *De Algemene Volkscredietbank* (AVB). AVB bertujuan membantu dan memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif, misalnya: perkebunan kecil, perikanan, pertanian, usaha industri kecil dan kerajinan.³ *De Postspaarbank* sendiri mempunyai tugas khusus yaitu menanamkan kebiasaan menabung bagi masyarakat karena pada saat itu mereka tidak mengetahui tentang pentingnya menabung.

Berbeda dengan masa pemerintahan Belanda, perkembangan perbankan ketika masa Jepang justru tidak begitu terlihat. Terdapat beberapa bank yang terpaksa harus diganti namanya dan sebagian lainnya bahkan dibekukan. Pada

² *Ibid.*, hlm. 4-5.

³ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 5-8.

tanggal 9 Maret 1942 ketika Hindia Belanda dikuasai oleh Tentara Pendudukan Jepang, seluruh direksi bank-bank di Hindia Belanda dipaksa untuk menandatangani penyerahan kekayaan tanpa syarat ke penguasa baru. Pemerintah militer Jepang kemudian melakukan *likuidasi*⁴ dalam bentuk *moratorium*⁵ yang berlaku bagi semua bank milik Belanda. Tim *likuidasi* mempunyai tugas antara lain menyelesaikan tagihan-tagihan yang masih harus dilunasi, pembayaran hasil likuidasi kepada para kreditur dan yang terakhir adalah menyelesaikan simpanan-simpanan tertutup dan *safeloket* (penyimpanan khasanah bank). Setelah pembubaran, bank-bank yang ada digantikan peranannya oleh tiga bank Jepang yang telah beroperasi di Hindia Belanda, yaitu *Yokohama Specie Bank*, *Taiwan Bank* dan *Mitsui Bank*.⁶

Keadaan berubah ketika perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan berhasil dan status merdeka diperoleh. Pemerintah mulai memperbaiki sistem pemerintahan setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh pada tahun 1949. Secara garis besar masalah yang mendesak dan harus segera diatasi pasca kemerdekaan adalah *pertama*, tugas untuk merehabilitasi perekonomian nasional yang telah mengalami kerusakan besar setelah pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan; *kedua*, tuntutan masyarakat luas untuk merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.⁷ Selama periode revolusi kemerdekaan (1945-1949), para pemimpin politik Indonesia telah mulai mencoba merumuskan konsep tentang ekonomi nasional dan

⁴ *Likuidasi* adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham (persero). Dikutip dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 827.

⁵ *Moratorium* adalah penangguhan pembayaran hutang yang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. *Ibid.*, hlm. 929.

⁶ Dawam Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 47-48.

⁷ Thee Kian Wie, *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PMB-LIPI, 1996), hlm. 4.

mengartikulasikannya untuk menggantikan warisan ekonomi kolonial. Aspirasi mereka terbagi menjadi dua arus utama, pertama ialah para ekonom pragmatis yang berpandangan bahwa investasi asing sementara diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pandangan kedua adalah sikap ekonomi yang lebih radikal. Kaum nasionalis kiri dan komunis berpendapat bahwa hanya penyitaan kekayaan pihak asing yang mampu membebaskan perekonomian Indonesia dari hambatan kaum imperialis. Mereka berpendapat bahwa perusahaan negara merupakan sarana yang tepat untuk membangun perekonomian nasional yang terpadu.⁸

Keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan masih belum stabil. Proses pemulihan kembali perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah berjalan lambat, hal itu mengakibatkan terjadinya inflasi serta bencana kekurangan pangan di Indonesia.⁹ Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian bangsa adalah dengan menasionalisasi beberapa perusahaan asing dan lembaga milik pemerintah kolonial. Pada bulan Februari tahun 1950, Presiden Soekarno menyatakan bahwa, “nasionalisasi merupakan soal bagi masa depan yang jauh di muka, penciptaan perekonomian nasional terlebih dahulu menuntut mobilisasi semua sumber modal baik dari dalam maupun luar negeri.”¹⁰

B. AWAL MUNCULNYA BANK TABUNGAN NEGARA DI INDONESIA

Postspaarbankdients dibentuk berdasarkan *Gouvernementsbesluit* No. 5 tanggal 30 Mei 1898 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 1898. Menurut keputusan tersebut, *Postspaarbankdients* dipimpin oleh seorang *directur* yang kedudukannya berada di bawah *Directur der Burgelijke Openbare Werken* (sejak tahun 1908 di

⁸ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 2-3.

⁹ R. Z. Leirissa, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 85.

¹⁰ Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hlm. 3.

bawah *Directur van Gouvernementsbedrijven*). Untuk melakukan tugasnya, *Directur van Postspaarbankdiens* bekerja dengan memperhatikan petunjuk dan pengawasan *Raad van Toezicht op de Postspaarbankdiens in Nederlandsch Indie* (Badan Pengawas Jawatan Bank Tabungan Pos).

Berdasarkan *Gouvernementsbesluit* No. 59 tanggal 30 Desember 1915 dibentuk *Postsaarbank in Nederlandsch Indie* (PSNI) sebagai bank milik pemerintah dan memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Pemerintah Hindia Belanda menjamin pembayaran kembali tabungan termasuk bunganya kepada para penabung. Jika PSB tidak mampu mengembalikan uang nasabah maka pemerintah yang akan membayarnya. Ketentuan terakhir tentang *Postsaarbank in Nederlandsch Indie* dalam pemerintahan Hindia Belanda ditetapkan dalam *Postspaarbank Ordonantie*.¹¹

Postspaarbank mempunyai tugas utama yaitu mengajarkan masyarakat Hindia Belanda untuk terbiasa menabung. Pada perjalannya, tampak jelas PSB berupaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tugas tersebut. Sebelum masuknya PSB di Indonesia, masyarakat Indonesia termasuk pada kelompok masyarakat yang tidak tertarik untuk menabung. Pada saat itu mereka lebih memilih untuk langsung menghabiskan uangnya. Uang tersebut mereka gunakan untuk membeli keperluan primer. Jika ada kelebihan, sisa uang itu biasanya mereka gunakan untuk mengadakan pesta. Mereka memilih untuk tidak menyimpan sisa uang karena kondisi rumah mereka yang tidak aman dari pencuri. Terbatasnya lembaga keuangan yang menyediakan jasa tabungan juga menjadi alasan masyarakat saat itu tidak menabung.¹²

C. BANK TABUNGAN NEGARA SEBAGAI LEMBAGA MILIK PEMERINTAH

Keadaan perbankan Indonesia pada awal tahun 1950-an merupakan warisan dari masa sebelum Perang Dunia kedua, namun yang membedakan adalah ketika

¹¹ *Ibid.*, hlm 155. Undang-undang tentang *Postspaarbank* dijelaskan secara rinci pada *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, No. 653, Jrg. 1934.

¹² Pandu Soeharto, *op.cit.*, hlm. 13-14.

pra kemerdekaan perbankan Indonesia didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda, sedangkan menjelang akhir tahun 1950-an bank-bank tersebut dan beberapa bank swasta asing telah dinasionalisasi menjadi bank resmi milik negara. Keadaan tersebut berlangsung hingga tahun 1968, dimana kegiatan perbankan Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh bank milik pemerintah.¹³ Salah satu langkah nasionalisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah terjadi pada 9 Februari 1950 dengan ditetapkannya UUDr No. 12 Tahun 1950 oleh Presiden Soekarno. Undang-undang tersebut berisi mengenai pengubahan Undang-undang *Postspaarbank* disertai pergantian isi pasal-pasalannya. Beberapa pengubahan tersebut diantaranya, pergantian nama “Batavia” menjadi “Jakarta” dan nama “Postspaarbank” menjadi “Bank Tabungan Pos”.¹⁴ Tanggal 9 Februari ditetapkan pula sebagai hari lahir Bank Tabungan Negara.

Bank Tabungan Pos didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama *Postspaarbank*. Fungsi utama dari bank ini sejak dahulu hingga saat ini tidak berubah, yaitu sebagai pengumpul dana dalam bentuk tabungan yang kemudian disalurkan ke investasi. Jumlah kantor-kantor BTP terus terus berkembang. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah dan depositnya. Perkembangan tersebut sudah terlihat sejak permulaan tahun 1950-an. BTP melakukan promosi menggunakan *pamflet*, *poster*, radio serta media *reklame* lain dengan tujuan mengajak masyarakat agar mau menabung.¹⁵ BTP menjalankan kegiatan perbankan dan usaha-usaha lainnya menggunakan kantor pos. Penguasaan dan pengelolaan organisasi serta tata kerja BTP berada di bawah kewenangan Menteri Perhubungan.¹⁶

¹³ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 17-18.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia Serikat, *Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1950*. Lihat: Lampiran 7, hlm. 119.

¹⁵ Faried Wijaya, *op.cit.*, hlm. 101.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *UU No. 36 Th. 1953 Tanggal 18 Desember 1953* (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 86).

Pada awal kemunculannya, BTP hanya memberikan kredit jangka panjang kepada lembaga-lembaga pemerintah dan tidak memberikan pinjaman kepada usaha swasta. Permintaan pinjaman harus diajukan dengan cukup birokratis melalui Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan Pekerjaan Umum sebelum kemudian diputuskan melalui kesepakatan bersama. Kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah dipergunakan untuk pembangunan pasar-pasar di kota, perbaikan transportasi, dan beberapa keperluan pelayanan umum lainnya. Semua kredit berjangka waktu 10 sampai 20 tahun. Selama tahun 1950-1960 bank ini melaksanakan kebijakan konservatif dan mendapat reputasi cukup baik di kalangan masyarakat.

D. REORGANISASI PADA BANK TABUNGAN NEGARA

Selama perkembangan sejarahnya sampai sekarang, Bank Tabungan Negara (BTN) mengalami beberapa pergantian nama dan reorganisasi. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos (BTP) diubah namanya menjadi BTN dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1963. Status semula BTN yang berada di bawah pimpinan Departemen Perhubungan, kemudian dipindahkan ke bidang keuangan dan berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Bank Indonesia diberi kuasa menjadi Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Pengawas. Pada tahun 1965, dalam proses pelaksanaan perubahan struktur organisasi bank-bank pemerintah, sebagai salah satu bank milik pemerintah BTN diintegrasikan ke dalam sistem "Bank Tunggal" dan diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit V.

Sistem Bank tunggal tidak dapat berlangsung lama. Pada akhir 1965 dan awal 1966 Indonesia penuh dengan gejolak, tekanan ekonomi yang semakin berat terus menghimpit kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak Peristiwa 30 September 1965 yang melibatkan PKI dan tentara secara politis juga telah menggiring pada suatu proses peluruhan kekuasaan pemerintahan terpimpin. Demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan keadaan ekonomi, sosial, dan politik, mulai menggoyahkan kekuasaan pemerintah. Bank tunggal pun juga terhenti karenanya.

Pada tahun 1967 dilakukan penataan kembali perbankan Indonesia. Menurut fungsinya, bank-bank dibedakan menjadi bank sentral, bank umum dan bank pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan isi Undang-undang No. 14/1967. Menurut kepemilikan dapat dibedakan menjadi bank milik pemerintah pusat atau daerah, milik swasta atau milik koperasi serta milik asing. Bank Negara Indonesia Unit V dikembalikan menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-undang No. 20/1968. Manajemen bank terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi, keduanya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah. Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masing-masing direktur membawahi dan mengatur beberapa bagian. Kantor pusat bank terletak di Jakarta dan mempunyai beberapa kantor yang tersebar di Jawa maupun luar Jawa.¹⁷

Bank Tabungan Negara (BTN) diberi modal sejumlah Rp.100.000.000,- yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal tersebut dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi utama BTN adalah mengumpulkan dana atau deposito dalam bentuk tabungan dan menginvestasikannya dalam bentuk surat-surat berharga yang solid, serta memberikan kredit-kredit lain dengan pengawasan Bank Indonesia. Jika terjadi pe Pembubaran bank, maka penunjukkan *likuidator* ditetapkan melalui Undang-undang. Semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari kekayaan bank dan sisanya menjadi milik negara. Mengenai ketentuan peralihan yang berhubungan dengan pengembalian status BNI Unit V, segala hak, kewajiban, kekayaan dan perlengkapan beralih menjadi milik BTN.¹⁸

E. KESIMPULAN

Bank Tabungan Negara pertama kali didirikan pada tahun 1897 dengan nama *Postspaarbank*. Keinginan untuk mendirikan *Postspaarbank* didasari oleh hasil diskusi yang kemudian diusulkan oleh *Directur der Rijkspostspaarbank in Nederland* dan *Hoofdinspecteur van den Post en Telegraafdiens* di Belanda.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Undang-undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara, hlm. 802.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 803-811.

Tujuannya adalah melakukan kegiatan bank tabungan sebagai bagian dari *Post en Telegraafdients* di Hindia Belanda yang dipimpin oleh seorang *inspectur* dari jawatan tersebut. Pengkajian tentang usul tersebut berlangsung sejak tahun 1892 hingga tahun 1896 dan akhirnya berujung dengan dikeluarkannya *Koninklijk* (Keputusan Kerajaan) *Besluit* No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 yang memerintahkan pembentukan suatu *Postspaarbank* di Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Pendirian *Postspaarbank* mempunyai tujuan antara lain untuk mendidik masyarakat agar terbiasa menabung.

Pada tahun-tahun pertama kemunculannya, pemerintah hanya memberikan pinjaman sebagai modal kerja kepada *Postspaarbank* dengan batas waktu pengembalian selambat-lambatnya tiga tahun dari waktu peminjaman. Dalam upayanya untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat, PSB bekerjasama dengan Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (PTT). Jawatan tersebut menyediakan tempat untuk menabung. *Postspaarbank* mengalami kemunduran ketika Pemerintah Jepang mengambil alih kepemilikan bank tersebut. *Postspaarbank* diganti namanya menjadi *Tyokin Kyoku*, sementara uang tabungan milik bangsa Belanda dibekukan. *Tyokin Kyoku* gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat merasa adanya paksaan untuk menabung, sehingga dengan sendirinya masyarakat tidak melakukan penabungan. Meskipun jumlah nasabahnya banyak akan tetapi jumlah uang yang mereka setorkan tergolong kecil. Terlebih lagi jumlah penggunaan uang yang besar untuk kebutuhan perang.

Nasionalisasi terhadap *Postspaarbank* dilakukan pemerintah pada tahun 1950. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian bangsa adalah dengan mengambil alih kepemilikan bank dan lembaga keuangan resmi milik kolonial. Pada tahun 1950 pemerintah menasionalisasi *De Postspaarbank* dan kemudian mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Langkah nasionalisasi terhadap *Postspaarbank* terjadi pada 9 Februari 1950 dengan ditetapkannya UUDr No. 12 Tahun 1950 oleh Presiden Soekarno. Undang-undang tersebut berisi mengenai perubahan Undang-undang *Postspaarbank* disertai pergantian isi pasal-pasalanya. Beberapa perubahan

tersebut diantaranya, pergantian nama “Batavia” menjadi “Jakarta” dan nama “Postspaarbank” menjadi “Bank Tabungan Pos”.

Bank Tabungan Pos sebagai lembaga keuangan milik pemerintah memusatkan kegiatan pada pengumpulan deposito dan tabungan kecil di seluruh Indonesia. Jumlah kantor-kantor Bank Tabungan Pos terus berkembang. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah dan depositnya. Perkembangan tersebut sudah terlihat sejak permulaan tahun 1950-an. Bank Tabungan Pos melakukan promosi menggunakan *pamflet*, *poster*, radio serta media *reklame* lain dengan tujuan mengajak masyarakat agar mau menabung. Bank Tabungan Pos menjalankan kegiatan perbankan dan usaha-usaha lainnya menggunakan kantor pos. Penguasaan dan pengelolaan organisasi serta tata kerja Bank Tabungan Pos berada di bawah kewenangan Menteri Perhubungan. Bank Tabungan Pos dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, Direktur Muda, dan beberapa Agen yang bertugas mengurus kantor-kantor cabang Bank Tabungan Pos yang ada di Jakarta, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya.

Pada awalnya, Bank Tabungan Pos hanya memberikan kredit jangka panjang kepada lembaga-lembaga pemerintah dan tidak memberikan pinjaman kepada usaha swasta. Permintaan pinjaman harus diajukan dengan cukup birokratis melalui Kementrian Keuangan, Dalam Negeri, dan Pekerjaan Umum sebelum kemudian diputuskan melalui kesepakatan bersama. Kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah dipergunakan untuk pembangunan pasar-pasar di kota, perbaikan transportasi, dan beberapa keperluan pelayanan umum lainnya. Semua kredit berjangka waktu 10 sampai 20 tahun. Selama tahun 1950-1960 bank ini melaksanakan kebijakan konservatif dan mendapat reputasi cukup baik di kalangan masyarakat.

Bank Tabungan Negara beberapa kali mengalami pergantian nama dan reorganisasi. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos diubah namanya menjadi Bank Tabungan Negara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1963. Status semula Bank Tabungan Negara yaitu berada di bawah pimpinan Departemen Perhubungan kemudian dipindahkan ke bidang keuangan, dan berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Bank Indonesia diberi kuasa

menjadi Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Pengawas. Pada tahun 1965, dalam proses pelaksanaan perubahan struktur organisasi bank-bank pemerintah, Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam sistem “Bank Tunggal” dan diubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.

Tahap proses pengintegrasian bank-bank umum pemerintah dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan bahwa segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank Tabungan Negara beralih ke Bank Indonesia. Dewan Pengawas dibubarkan terhitung sejak berlakunya Penetapan Presiden tentang pengintegrasian Bank Tabungan Negara. Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Presiden Direktur dan Direktur-direktur Bank Tabungan Negara diperbantukan pada Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Pengganti. Bank Indonesia mengadakan penampungan-penampungan organisatoris seperlunya, untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas dari Bank Tabungan Negara. Melalui pengintegrasian dan peleburan bank-bank milik pemerintah ke dalam Bank Tunggal, secara yuridis Bank Tabungan Negara telah menjadi satu badan hukum. Bank Tunggal terbagi atas unit-unit yang didasarkan pada asal masing-masing bank milik negara. Jenis usaha masing-masing unit tetap sama seperti sebelum diintegrasikan.

Sistem Bank Tunggal dihapuskan pada tahun 1968, dan bank-bank yang sebelumnya diintegrasikan kembali pada tugas pokok masing-masing seperti sebelum proses integrasi. Bank Negara Indonesia Unit V dikembalikan menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-undang No. 20/1968. Manajemen bank terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi, keduanya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah. Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masing-masing direktur membawahi dan mengatur beberapa bagian. Kantor pusat bank terletak di Jakarta dan mempunyai beberapa kantor yang tersebar di Jawa maupun luar Jawa. Bank Tabungan Negara resmi berdiri sendiri sebagai bank yang merangkap badan hukum dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahun 1968 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

- Departemen Keuangan, *Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang R.U.U. Bank-bank Negara Selain Bank Sentral*, 1952, No. 313/MK.
- Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, *Bank Tabungan Pos: Laporan Tentang Tahun 1950-1952*.
- Lembaga Kebudayaan Indonesia, *Bank Tabungan Pos Indonesia: Laporan Tentang Tahun 1953-1959*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, 1950, No. 12. *UUDr No. 9 Tahun 1950 Tentang Perubahan Undang-undang Postspaarbank Menjadi Bank Tabungan Pos*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, 1953, No. 86. *Undang-Undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, 1964, No. 51. *Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Pendirian Bank Tunggal Milik Negara*, 1965, No. 74. *Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Pendirian Bank Sentral*, 1968, No. 63. *Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Pendirian Bank Tabungan Negara*, 1968, No. 73. *Undang-undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara*.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia, *Ketentuan Tambahan Perihal Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral*, 1965, No. 16.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia, *Ketentuan Tambahan Perihal Pendirian Bank Tunggal Milik Negara*, 1965, No. 18.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia, *Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral*, 1965, No. 8.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Bank Tabungan Pos*, 1963, No. 4.

Buku-buku dan Artikel

Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Budiman Ginting, “Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia”, *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, 2007.

Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara: 2009.

Dawam Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959: Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.

_____, *Sejarah Bank Indonesia Periode 2: 1959-1966: Bank Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.

Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Gottschalk, Louis., *Understanding History*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1985.

Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005.

_____, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- _____, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Mestika Zed dan Mukhlis PaEni, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, Jakarta: PT Ihtiar baru van Hoeve, 2013.
- Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988.
- R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- R. Z. Leirissa, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Jilid 2.*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Thee Kian Wie, *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia*, Jakarta: PMB-LIPI, 1996.
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013.
- W. Best, John., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Skripsi, Tesis

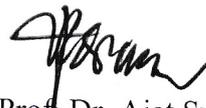
- Andono Adam Sukhajat, “Dinamika Bank Sentral Indonesia 1946-1968”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.
- Prajogo, “Beberapa Masalah Hubungan Kerja pada Bank Tabungan Negara”, *Tesis*, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, 1971.
- Puthut Apriyanto, “Dinamika Bank Rakyat Indonesia Tahun 1946-1965: Kajian Sejarah Lembaga Perkreditan Rakyat di Purwokerto”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Pembimbing



Dina Dwikurinarini, M.Hum.
NIP. 19571209 198702 2 001

Yogyakarta, 17 Oktober 2016
Mengetahui
Reviewer



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001